

**PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN KOTA LENGKAP UNTUK
PEMBARUAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN
CAKRANEGARA UTARA, KOTA MATARAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:
GIPIH SHIVAM VIVEKANANDA
NIT. 21303637

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The management of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) serves as one of the main sources of Local Own-Source Revenue (PAD). However, the current tax object data is not yet based on up-to-date and verified spatial data, resulting in inaccurate tax assessments and hampering the optimization of PAD. To address this issue, the integration of land certificate data (Right Number) and Tax Object Number (NOP) offers a strategic solution. The “Kota Lengkap” (Complete City) program initiated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) promotes comprehensive spatial validation. In this context, the Regional Revenue Agency (BKD) of Mataram City collaborates with the Land Office to utilize this data for the integration and updating of PBB records. This study aims to analyze the implementation of land data utilization under the Kota Lengkap program for updating Land and Building Tax (PBB) data in Cakranegara Utara Subdistrict and to compare the potential tax revenue before and after the update. A mixed-methods approach was employed, using qualitative methods to explore stakeholder involvement, stages, challenges, and solutions in data integration, and quantitative methods to measure outcomes and revenue potential through spatial and descriptive statistical analysis.

The results indicate that this initiative represents a collaborative effort involving the Mataram City Government, the Land Office, BKD, and local stakeholders such as subdistrict officials, neighborhood heads, and tax collectors. The process began with socialization, data collection, spatial processing, and field surveys for data validation, resulting in significant updates in both spatial and attribute aspects. Spatially, discrepancies were found in location, shape, and area, along with the addition of 603 new tax objects. In terms of attributes, several land parcels were found to be unintegrated, with duplicate NOPs and mismatched subject data between land certificates and SPPTs, indicating the need for data improvement. The reduction in the number of uncharted K4 parcels reflects successful tracking of previously unmapped land parcels. However, challenges remain, including weak data integration and limited engagement from subdistrict authorities. Proposed solutions include issuing and tracking new NOPs, involving neighborhood leaders (RT), and enhancing public outreach. As a result of the update, the potential PBB revenue decreased by IDR 131,211,411, from IDR 770,285,765 to IDR 639,074,354 due to corrections in parcel area and administrative boundaries that previously did not refer to official land data. These findings demonstrate that the utilization of official land data improves tax accuracy and fiscal equity, although it may lead to a short-term decline in potential tax revenue.

Keywords: Land Data, Land and Building Tax, Spatial Integration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
INTISARI	xvi
<i>ABSTRACT</i>.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoretis	16
C. Kerangka Pemikiran	33
D. Pertanyaan Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Format Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	38
D. Definisi Operasional Konsep	40
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	44

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
A. Administrasi Kelurahan Cakranegara Utara	52
B. Kependudukan dan Fasilitas di Kelurahan Cakranegara Utara ..	53
C. Penggunaan Tanah di Kelurahan Cakranegara Utara	55
D. Bidang Tanah di Kelurahan Cakranegara Utara	56
E. Objek Pajak PBB di Kelurahan Cakranegara Utara	57
BAB V IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN	
KOTA LENGKAP UNTUK PEMBARUAN DATA PBB.....	58
A. Keterlibatan Lembaga dan Stakeholder	58
B. Pelaksanaan Integrasi Data	62
C. Hasil Pembaruan Peta Blok PBB.....	82
D. Kendala dan Solusi dalam Proses Integrasi Data.....	103
BAB VI PERBANDINGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI	
SEBELUM DAN SESUDAH PEMBARUAN DATA.....	110
A. Penentuan NJOP Bumi	110
B. Potensi Penerimaan Pajak Bumi Sebelum Pembaruan Data	112
C. Potensi Penerimaan Pajak Bumi Sesudah Pembaruan Data	118
D. Selisih Potensi Pajak Bumi Sebelum dan Sesudah Pembaruan Data	123
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DARTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan transformasi digital telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk menerapkan tata kelola berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Fadri dan Fil, 2024). Salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan modern adalah informasi berbasis spasial karena berperan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan dan dukungan berbagai jenis aktivitas (Saputro, 2016). Analisis spasial menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks geografis yang dinamis dan terus mengalami perubahan (Rahmawati dkk., 2024). Keakuratan dan integrasi data spasial tidak hanya mendukung efektivitas analisis, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan publik serta memfasilitasi sinkronisasi data lintas sektor, termasuk dalam bidang perpajakan.

Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung integrasi data lintas sektor sebagai upaya meningkatkan efisiensi layanan publik dan efektivitas pengelolaan data pemerintah. Pasal 349 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa pemerintah harus mendorong penyederhanaan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri menekankan interoperabilitas data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi pemerintahan. Regulasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai data pemerintahan, termasuk keuangan daerah, kependudukan, pencatatan sipil, serta pertanahan. Sementara itu, Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 1 Tahun 2023 mewajibkan keterbukaan data geospasial tematik pertanahan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan transparan.

Dalam konteks perpajakan daerah, pengelolaan pajak daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemungutan pajak ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi sumber penerimaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Nikmatika dkk., 2024). PBB-P2 berperan dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmawan, 2012).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan bahwa penerimaan negara dari PBB dibagi dengan proporsi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah sehingga PBB dijadikan sarana yang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi penerimaan PBB-P2 di beberapa daerah, termasuk Kota Mataram, masih belum optimal. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2015–2020, realisasi penerimaan hanya mencapai kisaran 20,26%–26,31% dari potensi yang ada (Nikmatika dkk., 2024). Berikutnya, pada bulan Agustus 2024, realisasi PBB-P2 di Kota Mataram tercatat sebesar Rp10,2 miliar dari target Rp30 miliar, atau sekitar 34% (Saraswati, 2024). Hal ini mencerminkan masih rendahnya efektivitas pengelolaan PBB-P2 di daerah tersebut.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 adalah pendataan dan penilaian spasial bidang tanah sebagai objek pajak yang tidak berdasarkan data yang valid dan terkini (Christina, 2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menekankan pentingnya pendataan wajib pajak dan objek pajak PBB-P2, termasuk penyusunan informasi geografis melalui peta blok. Peta blok PBB-P2 yang akurat dapat dibuat melalui berbagai metode, seperti pengukuran terestris, fotogrametri, dan pemanfaatan citra satelit (Aristalindra dkk., 2020). Pendataan ini tidak hanya mendukung optimalisasi penerimaan pajak, tetapi juga menjamin keadilan pajak bagi masyarakat.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang valid, pembenahan kualitas data spasial bidang tanah terus dilakukan, baik untuk tanah yang telah terpetakan maupun yang belum terpetakan pada peta blok PBB-P2 (Wahyuningsih, 2024). Dalam menilai kualitas data spasial yang dikumpulkan, terdapat enam faktor utama yang menjadi penentu, yaitu ketepatan garis, akurasi posisi, keakuratan atribut, konsistensi logis, kelengkapan data, serta ketepatan makna semantik (Navratil, 2020).

Salah satu langkah efektif untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah terdaftar adalah melalui kerja sama pendataan antara Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Kantor Wilayah/ Kantor Pertanahan setempat. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Hesekiel Sijabat, mengungkapkan bahwa akan dilakukan integrasi antara data Nomor hak sertifikat dan data Nomor Objek Pajak (NOP) yang telah diterbitkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang elektronik (e-SPPT) (Rinjani, 2025). Kolaborasi ini bertujuan untuk menyelaraskan data yang tercantum dalam sertifikat tanah dengan data dalam SPPT PBB-P2, sehingga tercipta kesesuaian yang dapat mendukung administrasi perpajakan secara lebih akurat.

Pendekatan spasial dalam sistem administrasi pertanahan telah terbukti efektif dalam mendukung administrasi perpajakan (Williamson, 2001). Sistem kadaster di Eropa sejak awalnya dirancang dan dikembangkan untuk tujuan perpajakan (Križanović dkk., 2021). Misalnya di Kroasia yang telah menggunakan data pertanahan sebagai dasar penghitungan pajak properti sejak abad ke-19 dan masih mempertahankannya hingga saat ini, sementara itu di Green County, Ohio, Amerikat Serikat (AS), informasi pajak ditampilkan dalam *Property Card*, yang mencakup nilai tanah, pajak, dan distrik pajak (Križanović dkk., 2021). Hal ini menegaskan bahwa ketersediaan data pertanahan yang lengkap dan akurat, baik dalam aspek spasial maupun yuridis, memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pembaruan data perpajakan secara lebih efektif.

Sebagai upaya menyediakan data yang akurat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan berbagai terobosan dengan mentransformasi layanan pertanahan dari sistem manual ke berbasis elektronik. Transformasi ini dilakukan melalui peningkatan kualitas data serta percepatan proses pendaftaran tanah hingga tercapainya target Indonesia

Lengkap yang terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diharapkan dapat mewujudkan pendaftaran tanah yang menyeluruh di Indonesia, dimulai dari pendaftaran tanah berbasis desa/kelurahan lengkap, kemudian berkembang menjadi kabupaten/Kota Lengkap, serta diiringi dengan perbaikan data pendaftaran tanah secara simultan (Rahmawati, 2022). Salah satu daerah yang telah dideklarasikan sebagai Kota Lengkap adalah Kota Mataram (Pessy, 2024). Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Mataram, luas wilayah administrasi kota ini mencapai 6.013 hektare dengan jumlah 132.691 persil bidang tanah telah terpetakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 126.682 persil atau 95,17% telah dinyatakan valid (data per November 2024).

Sebagai bagian dari upaya integrasi data pertanahan, pada tahun 2024 BKD Kota Mataram bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam upaya mengintegrasikan data Nomor hak sertifikat dan Nomor Objek Pajak (NOP) kedalam satu sistem pemetaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor 04/MOU.MTR/V/2024 dan Nomor 517.1/Mo0-52.72.UP.02.01/V/2024. Kegiatan survei dan pendataan tanah spasial telah dilaksanakan di 14 kelurahan dan diperluas ke 7 kelurahan tambahan melalui APBD perubahan. Salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan program ini adalah Kelurahan Cakranegara Utara. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, BKD, Kepala Padukuhan, hingga Ketua RW/RT sebagai pelaksana kegiatan.

Dengan pemanfaatan data pertanahan Kota Lengkap, pemerintah daerah dapat mengurangi kesenjangan data antar instansi, meminimalisir selisih nilai pajak, dan mendukung implementasi kadaster multifungsi (Junarto dan Djurjani, 2020). Kadaster ini tidak hanya mendukung kebutuhan perpajakan, tetapi juga pengembangan infrastruktur publik seperti listrik, air bersih, dan layanan lainnya (Pinuji, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemanfaatan data pertanahan untuk pembaruan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan akurasi pendataan pajak guna mengoptimalisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN KOTA LENGKAP UNTUK PEMBARUAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN CAKRANEGARA UTARA, KOTA MATARAM"**.

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks perpajakan daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun realisasi penerimaannya masih belum optimal, seperti yang terjadi di Kota Mataram, di mana pencapaian PBB-P2 masih jauh dari target. Salah satu faktor penyebabnya adalah pendataan objek pajak yang belum berbasis data spasial yang valid dan terkini. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara data Nomor hak sertifikat dan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk meningkatkan akurasi pendataan dan optimalisasi pajak daerah. Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi program Kota Lengkap, dengan Kota Mataram sebagai salah satu daerah yang bidang tanahnya hampir terdaftar dan terpetakan sepenuhnya. Untuk mendukung efektivitas pemanfaatan data pertanahan, BKD Kota Mataram bekerja sama dengan Kantor Pertanahan dalam upaya integrasi data menggunakan APBD, yang mencakup survei dan pendataan di beberapa kelurahan, salah satunya Kelurahan Cakranegara Utara. Dengan pemanfaatan data pertanahan secara optimal, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan data antar instansi, meningkatkan akurasi pajak, serta berkontribusi dalam optimalisasi PAD. Berangkat dari pernyataan tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan yang diambil sebagai pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana implementasi pemanfaatan data pertanahan Kota Lengkap untuk pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cakranegara Utara agar menjadi suatu sistem informasi terintegrasi?
2. Bagaimana perbandingan potensi penerimaan Pajak Bumi sebelum dan sesudah pembaruan data perpajakan di Kelurahan Cakranegara Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi pemanfaatan data pertanahan Kota Lengkap untuk pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cakranegara Utara agar menjadi suatu sistem informasi terintegrasi.
2. Menganalisis perbandingan potensi penerimaan Pajak Bumi sebelum dan sesudah pembaruan data perpajakan di Kelurahan Cakranegara Utara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti tentang proses pengintegrasian data spasial yang berbeda ke dalam satu peta spasial untuk menunjang konsep kadaster multiguna.
2. Bagi instansi BKD diharapkan dapat memberikan informasi terkait potensi pajak bumi yang bisa dihasilkan dari kegiatan pembaruan data perpajakan di Kelurahan Cakranegara Utara sehingga membantu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pengelolaan pajak bumi dan bangunan.
3. Bagi perspektif akademik adalah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait pengembangan basis data pertanahan berbasis konsep kadaster multiguna.

E. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Selain itu, penetapan batasan dalam penelitian bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup kajian agar lebih terfokus dan sistematis.

1. Data perpajakan yang diintegrasikan mencakup data Pajak Bumi, yang dihimpun serta dipungut oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam konteks pengelolaan pertanahan.
2. Pengintegrasian data PBB dalam penelitian ini hanya berfokus pada bidang tanah, tanpa mencakup analisis terhadap objek bangunan.
3. Analisis perbandingan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam penelitian ini hanya difokuskan pada objek pajak bumi (bidang tanah)

dan tidak mencakup perhitungan terhadap objek pajak bangunan.

4. Lingkup penelitian terbatas pada satu wilayah administratif, yaitu Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data perpajakan dan pertanahan per November 2024, yang mencakup informasi terkini pada saat proses pengintegrasian.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengintegrasian data Pajak Bumi pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan data pertanahan di Kelurahan Cakranegara Utara merupakan upaya kolaboratif lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Kota Mataram, Kantor Pertanahan, Badan Keuangan Daerah (BKD), serta aktor lokal seperti kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, juru pungut, dan tokoh masyarakat. Tahapan awal pembaruan Peta Blok PBB dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, dilanjutkan dengan pengumpulan data dari BKD dan Kantor Pertanahan, pengolahan data spasial bidang tanah (kegiatan studio), serta pelaksanaan survei lapangan untuk validasi data yang menghasilkan pembaruan signifikan baik pada aspek spasial maupun atribut data. Secara spasial, ditemukan perbedaan posisi, bentuk, luas dan peningkatan jumlah objek pajak sebesar 603 bidang. Dari sisi atribut, terdapat bidang tanah yang belum terintegrasi dan duplikasi NOP, serta ketidaksesuaian data subjek antara sertifikat dan SPPT yang mengindikasikan perlunya perbaikan data. Penurunan jumlah bidang K4 yang belum terpetakan menunjukkan keberhasilan pelacakan posisi bidang K4 melalui kegiatan survei lapangan. Namun demikian, kegiatan ini menghadapi kendala berupa duplikasi NOP, NOP yang tidak terintegrasi, minimnya peran kelurahan, dan hambatan validasi lapangan. Solusi yang diperlukan meliputi penerbitan NOP baru untuk bidang hasil pemecahan, pelacakan NOP yang belum terdata, pelibatan Ketua RT dalam Satgas, penyediaan kelengkapan atribut satgas di lapangan serta peningkatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat guna mendukung proses validasi terhadap objek maupun subjek pajak di lapangan.
2. Berdasarkan hasil pembaruan data di Kelurahan Cakranegara Utara, terjadi penurunan potensi penerimaan Pajak Bumi sebesar Rp131.211.411, dari Rp770.285.765 menjadi Rp639.074.354. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan luas bidang tanah dan batas administrasi kelurahan objek pajak pada Peta Blok PBB lama dibandingkan dengan data terbaru yang mengacu pada data pertanahan.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak sebelumnya membayar lebih dari kewajiban sebenarnya, sehingga pembaruan ini penting untuk menciptakan keadilan dan akurasi dalam sistem pemungutan pajak.

B. Saran

1. Pemerintah daerah disarankan membentuk Satgas Khusus di tingkat kelurahan yang terdiri dari RT, kepala lingkungan, serta tokoh masyarakat dengan dukungan anggaran operasional. Tim ini bertugas melakukan pendampingan survei, identifikasi subjek pajak, serta pemantauan dinamika spasial di wilayahnya masing-masing.
2. BKD bersama Kantor Pertanahan perlu segera menyusun kebijakan penomoran ulang NOP untuk bidang hasil pemecahan agar tidak terjadi duplikasi. Selain itu, integrasi data SPPT dan sertifikat harus difasilitasi melalui sistem digitalisasi berbasis *web* yang memungkinkan *real-time updating* atas peristiwa kepemilikan, pemecahan, dan penggabungan bidang.
3. Penelitian ini menyarankan adanya kajian lanjutan yang secara khusus memasukkan variabel luas bangunan dalam penghitungan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini penting mengingat bangunan merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan nilai objek pajak secara keseluruhan.

DARTAR PUSTAKA

- Aditama, N. A. P., Subiyanto, S., dan Amarrohman, F. J. (2020). Uji Kualitas Peta Pendaftaran Tanah Pada Sistem GEOKKP di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Geodesi Undip*, 9(2), 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jgundip.2020.26917>
- Aditiawarman. (2021). *Pemanfaatan Peta Pendaftaran Tanah untuk Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman* [Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta]. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/3508>
- Agustin, P. D., Dinanty, D., dan Nasution, J. H. (2024). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5(5), 1–7. <https://doi.org/https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/download/3181/2990/9814>
- Ahmad, dan Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186. <https://doi.org/https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605/841>
- Alfansyur, A., dan Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Anasiru, R. H. (2016). Analisis Spasial Dalam Klasifikasi Lahan Kritis di Kawasan Sub-Das Langge Gorontalo. *Informatika Pertanian*, 25(2), 261–272. <https://doi.org/10.21082/ip.v25n2.2016.p261-272>
- Aristalindra, F., Santosa, P. B., Diyono, D., dan Subaryono, S. (2020). Evaluasi Pemanfaatan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi untuk Percepatan Pembuatan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) secara Partisipatif di Desa Triharjo, Kabupaten Bantul, DIY. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.22146/jgise.55788>
- Arnanto, A., Suharno, S., dan Supriyanti, T. (2023). Pemanfaatan Basis Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Penyusunan Kadaster Multiguna di Kabupaten Boyolali. *Tunas Agraria*, 6(2), 125–137. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.218>
- Badan Informasi Geospasial. (2014). *Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan*. Badan Informasi Geospasial, Cibinong [https://peraturan.bpk.go.id/Download/157843/Perpres Nomor 23 Tahun 2021.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/157843/Perpres%20Nomor%2023%20Tahun%202021.pdf)
- Badan Pertanahan Nasional. (2011). *Aplikasi GIS untuk Pembuatan Peta Indikatif Batas Kawasan dan Wilayah Administrasi*. Direktorat Pengukuran Dasar Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Jakarta. <https://pengukurandasarbpnsulteng.wordpress.com/wp>

content/uploads/2011/02/materi-ojt-gis-peta-indikatif.pdf

- Badan Pusat Statistika Kota Mataram. (2024). Kecamatan Cakranegara Dalam Angka 2024. Mataram. <https://mataramkota.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/6a9fb65798665f74bc981a2e/kecamatan-cakranegara-dalam-angka-2024.html>
- Bashit, N., Susanti, S., Ariany, Z., dan Syakur, A. (2020). Pelatihan Penggunaan Software QuantumGIS untuk Peningkatan Kualitas Data Geospasial Desa Karanganyar. *Jurnal Pasopati*, 2(3), 150–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/pasopati.2020.7096>
- Budiarsa, I. K. (2024). Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Karangasem. *Journal of Applied Management Studies (JAMMS)*, 6(1), 101–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.51713/jamss.2024.6138>
- Christiawan, P. I. (2014). Inovasi Pendidikan Bencana Berbasis Pendekatan Spasial di Indonesia. *Media Komunikasi Geografi*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/mkg.v15i1.11419>
- Christina, F. (2023). *Sistem Informasi Terintegrasi untuk Pelayanan Perpajakan dengan Pelayanan Pertanahan di Kabupaten Sleman* [Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta]. http://repository.stpn.ac.id/4070/1/FraniscaChristina_19283251__1.pdf
- Dekanawati, V., Astriawati, N., Setiyantara, Y., Subekti, J., dan Kirana, A. F. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Diklat Kepabeanan Terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 23(2), 159. <https://doi.org/10.33556/jstm.v23i2.344>
- Deviantari, U. W., Budisusanto, Y., dan Muhammad, R. N. (2021). Analisis Kesesuaian Peta Bidang Tanah Tersertifikat dengan Wajib Pajak untuk Penentuan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Desa Bungurasih). *Geoid: Journal of Geodesy and Geomatics*, 17(1), 93–98. <https://pdfs.semanticscholar.org/3add/d2da2d6294de5ffe6fb75401184dea585455.pdf>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. (2024). Laporan Jumlah Penduduk SMT 1 Tahun 2024. Mataram. <https://dukcapil.mataramkota.go.id/pages/datakependudukan>
- Direktur Jenderal Pajak. (2000). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/save/1187>
- Direktur Jenderal Pajak. (2010). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Direktur

- Jenderal Pajak. Jakarta. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/save/14160>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fadri, Z. (2024). *Era Digital dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik*. Penerbit Tri Edukasi Ilmiah, Kabupaten Agam.
- Fernando, E., Touriano, D., Murad, D. F., Bimo, A. C., dan Riau, P. C. (2018). Pemetaan dan Analisa Sebaran Tempat Public pada Kecamatan Jambi Timur di Kota Jambi dengan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Sistem Komputer Dan Kecerdasan Buatan*, II(1), 5–11. <https://doi.org/https://www.jurnal.tau.ac.id/index.php/siskom-kb/article/view/34/168>
- Firdaus, S. S., Budisusanto, Y., dan Deviantari, U. W. (2021). Visualisasi Spasial dan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus : Desa Bener, Madiun). *Geoid*, 16(1), 131–138. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v16i1.8567>
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.47709/jap.v2i1.1592>
- Gharini, D. A. (2017). *Pemutakhiran Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Menggunakan Peta Pendaftaran Tanah* [Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/130459>
- Imamuddin, M., dan Isnaniah, I. (2023). Peranan Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembelajaran Matematika. *Kaunia: Integration and Interconnection Islam and Science Journal*, 19(1), 15–21. <https://doi.org/10.14421/kaunia.3975>
- Imansyah, F. (2019). Pemetaan Sebaran Data Buta Aksara dengan Sistem Informasi Geografis dan Database Engine. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 5(1), 80–90. <https://doi.org/10.26418/jp.v5i1.31451>
- Imbing, O. V. (2013). Analisis Penetapan NJOP dan Implikasinya Terhadap Penerimaan PBB di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 484–493. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/634>
- Inadjo, I. M., Mokalu, B. J., dan Kandowanko, N. (2022). Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Journal Ilmiah Society*, 2(4), 1–7. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/8077>
- Joesyiana, K. (2018). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Beserta Persada Bunda). *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(2), 90–103. <https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/article/view/2740/>

- Junarto, R., dan Djurjani, D. (2020). Pemanfaatan Teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk Pemetaan Kadaster. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1), 105–118. <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.428>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang. Sekretariat Negara. Jakarta. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/311930/Permen ATR BPN Nomor 1 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/311930/Permen%20ATR%20BPN%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (1997). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Biro Hukum Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Jakarta. [https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/download/94/PMNA 3.97.pdf](https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/download/94/PMNA%203.97.pdf)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2023). Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023. Biro Hukum Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Jakarta. [https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/download/1117/JUKNIS PTSL 2023.pdf](https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/download/1117/JUKNIS%20PTSL%202023.pdf)
- Kementerian Dalam Negeri. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Sekretariat Negara. Jakarta. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/359705/Permendagri No 5 Tahun 2024-OCR.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/359705/Permendagri%20No%205%20Tahun%202024-OCR.pdf)
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Sekretariat Negara. Jakarta. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/293566/234 _PMK.03 _ 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/293566/234_PMK.03_2022.pdf)
- Kementerian Keuangan. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta. [https://peraturan.bpk.go id/Download/366884/2024pmkeuangan081.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/366884/2024pmkeuangan081.pdf)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Modul Manipulasi Data Atribut*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bandung. <https://kalsel.antaranews.com/berita/13183/manipulasi-data-perusahaan>
- Križanović, J., Pivac, D., Tomić, H., dan Mastelić-Ivić, S. (2021). Review of Land Administration Data Dissemination Practices: Case Study on Four Different

- Land Administration System Types. *Land*, 10(1175), 1–21. <https://doi.org/10.3390/land10111175>
- Larasati, N. M., Subiyanto, S., dan Sukmono, A. (2017). Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P2T) Menggunakan Sistem Informasi Geografis Kecamatan Banyumanik Tahun 2016. *Jurnal Geodesi Undip*, 5(4), 132–139. <https://media.neliti.com/media/publications/202086-analisis-penggunaan-dan-pemanfaatan-tana.pdf>
- Levitasari, W., Nugraha, A. L., dan Amarrohman, F. J. (2017). Kajian Pendahuluan Penggunaan Basis Data Spasial Objek Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Open Source (Studi Kasus : Kelurahan Tembalang). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), 236–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.18148>
- Mampow, G. L., Manengkey, J., & Marunduh, A. (2020). Pengaruh Luas Lahan, Luas Bangunan dan Tata Letak Tanah Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Minahasa Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(2), 13–18. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.364>
- Marni, N. (2015). Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Pada Program GEOKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. In *Skripsi STPN Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Meidodga, I., Syahrin, A., Putra, R. T., Warfandu, F., dan Bimasena, A. N. (2023). Pemanfaatan Data Geospasial dalam Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Multiguna Bagi Multipihak. *Widya Bhumi*, 3(1), 62–80. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.51>
- Minu, M. H., Asmaddin, & Rahmawati. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Cirebon). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(3), 95–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.55340/administratio.v12i3.1505>
- Mokamat. (2009). Analisis faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan. In *Skripsi*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Navratil, G. (2020). Applications of GIScience for Land Administration. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 9(7), 1–6. <https://doi.org/10.3390/ijgi9070416>
- Nikmatika, N., Fadliyanti, L., dan Wijimulawiani, B. S. (2024). Analisis Potensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mataram Tahun 2015-2020. *Jurnal Konstanta*, 3(1), 137–155. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v3i1.1105>
- Nugraha, Y. K., dan Santosa, P. B. (2020). Evaluasi Kualitas Data Spasial dalam

- Kegiatan Pemutakhiran Data Pbb-P2 di Kabupaten Pacitan. *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, 3(01), 13–21. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2020.7760>
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. *Gramasurya*, 1, 1–200.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., dan Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Nusa, Y. (2019). Efektivitas Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika-Papua. *Jurnal Kritis*, 3(2), 59–98. <https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/81/61>
- Oswald, P., dan Astrini, R. (2012). *Modul Pelatihan Quantum GIS Tingkat Dasar*. Bappeda Provinsi NTB. https://bappeda.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2013/09/Bab01_Konsep-dasar-GIS.pdf
- Panjaitan, W. M., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2020). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun 2000 – 2019. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 49–59. <https://doi.org/10.36985/v456t676>
- Pemerintah Daerah Kota Mataram. (2024). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Mataram. Mataram. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/352767/PERDA](https://peraturan.bpk.go.id/Download/352767/PERDA%20NOMOR%201%20TAHUN%202024%20tentang%20Pajak%20dan%20Retribusi%20Daerah.pdf)
- Pemerintah Daerah Kota Mataram. (2024b). Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram Tahun 2024. Pemerintah Kota Mataram. Mataram.
- Pemerintah Daerah Kota Mataram. (2024c). Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemerintah Kota Mataram. Mataram. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/353370/PERWAL](https://peraturan.bpk.go.id/Download/353370/PERWAL%20NOMOR%201%20TAHUN%202024%20tentang%20Tata%20Cara%20Pemungutan%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20Perdesaan%20dan%20Perkantoran.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sekretariat Negara. Jakarta. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/35768/UU](https://peraturan.bpk.go.id/Download/35768/UU%20Nomor%2012%20Tahun%201985.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sekretariat Negara. Jakarta.

- [https://peraturan.bpk.go.id/Download/45772/PP No. 24 Th 1997.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/45772/PP%20No.%2024%20Th%201997.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Sekretariat Negara. Jakarta. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/157843/Perpres Nomor 23 Tahun 2021.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/157843/Perpres%20Nomor%2023%20Tahun%202021.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/311930/Permen ATR BPN Nomor 1 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/311930/Permen%20ATR%20BPN%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023a). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023b). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sekretariat Negara. Jakarta. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU%20Nomor%206%20Tahun%202023.pdf)
- Pessy. (2024). *Menteri AHY Deklarasikan 46 Kabupaten/Kota Lengkap di 23 Provinsi*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/nasional/1033437/menteri-ahy-deklarasikan-46-kabupaten-kota-lengkap-di-23-provinsi>
- Pinuji, S. (2016). Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur Data Spasial dalam Rangka Perwujudan One Map Policy. *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(1), 48–64. <http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/download/31/35>
- Prasetyo, R. A. (2024). Strategi dan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah dalam Rangka Mencapai Deklarasi Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Rachmah, Z., Rengkung, M. M., dan Lahamendu, V. (2018). Kesesuaian Lahan Permukiman di Kawasan Kaki Gunung Dua Sudara. *Jurnal Spasial*, 5(1), 118–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/sp.v5i1.19285>
- Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 1(2), 23–39. <https://media.neliti.com/media/publications/101468-ID-optimalisasi-pemungutan-pajak-bumi-dan-b.pdf>
- Rahmawati, L., Febrian, W. D., Fachruzzaki, Lengan, R., Dody, I. P., dan Suarnatha. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Analisis Spasial dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Review Pendidikan*

- Dan Pengajaran, 7(2), 4058–4068. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Rahmawati, N. (2022). Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. *Tunas Agraria*, 5(2), 127–141. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.177>
- Rendra, M. I. (2023). Penyusunan Peta Informasi Bidang Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) dengan Pemetaan Partisipatif. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.26623/ijsp.v4i1.6754>
- Rinjani, S. A. (2025). *Penyampaian Kebijakan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Tahun 2025*. Direktorat Jenderal Survei Dan Pemetaan Pertanahan Dan Ruang. <https://djsppr.atrbpn.go.id/berita/penyampaian-kebijakan-direktorat-jenderal-survei-dan-pemetaan-pertanahan-dan-ruang-tahun-2025>
- Rohmah, A. Z., Qosim, & Sulistyowati, R. (2024). Evaluasi Prosedur Verifikasi dan Validasi Objek PBB-P2 dalam Meningkatkan Pelayanan Pajak. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 41(1), 46–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.58906/melati.v41i2.203>
- Rohmah, T. S. (2024). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 9(1), 137–156. <https://doi.org/10.51211/joia.v9i1.2901>
- Rosdiana, Agus, F., dan Kridalaksana, A. H. (2015). Sistem Informasi Geografi Batas Wilayah Kampus Universitas Mulawarman Menggunakan Google Maps Api. *Jurnal Informatika Mulawarman*, 10(1), 38–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/jim.v10i1.24>
- Sandra, W. dewi mambrasar, Sudirman, S., & Wahyuni. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL + PM), Kendala dan Solusinya. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3), 22–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.120>
- Saputra, I. K. A. (2023). Analisis Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dalam Pembuatan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Denpasar. skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Saputro, W. A. (2016). Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan Multiguna di Desa Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. In *Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta*.
- Saraswati, S. (2024). *Realisasi PBB Kota Mataram Baru 34 Persen, Wajib Pajak Cenderung Bayar Jelang Jatuh Tempo*. Ntbsatu.Com. <https://ntbsatu.com/2024/08/10/realisasi-pbb-kota-mataram-baru-34-persen-wajib-pajak-cenderung-bayar-jelang-jatuh-tempo.html>
- Sartika, N., dan Krisnanda, D. K. (2020). Penerapan Kebijakan Intensifikasi dan

- Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1411>
- Sholichin, I. (2020). Pemanfaatan Peta Bidang Tanah Hasil Ptsl Untuk Pembaruan Peta Blok PBB (Studi Kasus : Blok 003 Desa Selopamioro , Imogiri , Bantul). skripsi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mulyani, D. S., dan Furqon, I. K. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 9–20. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v3i1.36>
- Suriani, N., Risnita, dan Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Sutriani, E., dan Octaviani, R. (2019). *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data* (pp. 1–22). <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/download>
- Syafri, S. H., Tilaar, I. S., dan Sela, R. L. . (2015). Identifikasi Kemiringan Lereng di Kawasan Permukiman Kota Manado Berbasis SIG. *Spasial*, 1(1), 70–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/sp.v1i1.8247>
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68–85. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>
- Tindaon, C. W. (2020). Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bogor. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Wahyuningsih, S. (2024). Pembenahan Data Spasial Bidang Tanah Pada Peta Blok PBB. (Slide Powerpoint), BKD Kota Mataram.
- Williamson, I. P. (2001). Land Administration “Best Practice” Providing the Infrastructure for Land Policy Implementation. *Land Use Policy*, 18(4), 297–307. [https://doi.org/10.1016/S0264-8377\(01\)00021-7](https://doi.org/10.1016/S0264-8377(01)00021-7)
- Wirapraja, R. T. (2012). Perbedaan Luas Bidang Tanah Antara Data SPPT PBB dan Data Sertipikat Beserta Akibatnya [Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta]. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. [http://repository.stpn.ac.id/1429/1/RADEN TIGRISNO WIRAPRAJA.pdf](http://repository.stpn.ac.id/1429/1/RADEN%20TIGRISNO%20WIRAPRAJA.pdf)
- Yam, J. H. (2022). Refleksi Penelitian Metode Campuran (Mixed Method). *Jurnal Empire*, 2(2), 126–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/empire.v2i2.3310>
- Yanto, F. H. (2021). Evaluasi Peta Blok 5 PBB Desa Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karangayar untuk Mendukung Program PTSL. *Geo Spatial*

- Proceeding*, 11–17. [https://proceeding.uns.ac.id/geospatial/article /view/2/2](https://proceeding.uns.ac.id/geospatial/article/view/2/2)
- Yanto, F. H., Legowo, S. J., H.S., C. G. P., Kurnianingsih, O., Rahmi, A. T., dan Pratiwi, K. H. (2022). Analisis Data Geospasial Menggunakan Metode Partisipatif untuk Pemetaan Wilayah Administrasi Desa dan Pajak Bumi dan Bangunan Studi Kasus: Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. *Geomatika*, 28(1), 61–68. <https://www.big.go.id/uploads /content/produk/Geomatika/Vol28.2/1.1308.pdf>
- Yaumi, M. (2011). Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 14(1), 88–102. <https://doi.org/10.24252/lp.2011v14n1a6>
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan Konseling. *QUANTA*, 2(2), 84–91. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>